

**PENULISAN HUKUM**

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
34/PUU-XI/2013 TERHADAP PASAL 24 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI  
INDONESIA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

**RICHA YUNINDIA**

201410110311111



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/  
PUU - IX TERHADAP PASAL 24 AYAT (2) UNDANG - UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI  
INDONESIA**

Diajukan Oleh:

**RICHA YUNINDIA**

201410110311111

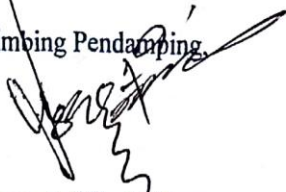
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 20 Januari 2018

Pembimbing Utama,

  
**Dr. Sulardi, SH., M.Si.**

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**



# SKRIPSI

Disusun oleh:

**RICHA YUNINDIA**

201410110311111

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 20 Januari 2018

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Sekretaris : Dr. Tongat, SH., M.Hum

Penguji I : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Maha Agung Allah SWT, Sang pemilik Segala Ilmu dan Semesta Alam, segenap rasa syukur penulis ucapkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan Salam tercurahkan kepada baginda Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan contoh kehidupan bagi umat muslim, hingga sampai saat ini juga, penulis bisa merasakan indahnya islam dan manisnya iman. Hidup dan Matiku hanya untuk Allah SWT.

Penyelesaian Skripsi ini adalah hal yang membahagiakan sekaligus membanggakan bagi penulis, karena menjadi pertanggung jawaban penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada proses penyelesaian skripsi ini, maupun dalam kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, pada kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak, Ibu, Papa dan Mama serta kakak-kakak penulis yang telah banyak berkorban baik secara moril maupun materil serta selalu mendoakan dan melakukan yang terbaik sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik hingga mencapai di titik puncak sebagai mahasiswi yang akan mendapat gelar sarjana S-1 Sarjana Hukum.
2. Drs. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih tercinta beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, selaku mantan Rektor UMM yang mengukuhkan penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum UMM pada tahun 2014. Penulis bangga pernah dipimpin bapak di kampus putih. Semoga amanah dan sukses dengan tugas yang baru sebagai Menteri Pendidikan RI;
4. Dr. Sulardi, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan ikhlas membimbing penulis serta memberikan penulis pandangan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga penulis banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat;
5. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Wali penulis terimakasih atas segala bimbingan yang diberikan kepada penulis, Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. (Wakil Dekan I), Dr. Haris, S.H., M.Hum (Wakil Dekan II), Said Noor P, S.H., M.H (Wakil Dekan III), dan Bayu Dwi Widdy Djatmiko, S.H., M.Hum selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, terimakasih telah menjadi motivator dan inspirasi penulis;
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat sebutkan satu Persatu dalam skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat didunia dan akhirat amin, jasa-jasa beliau tiada batasnya;

7. Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum UMM dan pejabat Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak membantu penulis;
8. Sahabat-sahabat penulis Chobiess, Shofi, Maila, dan Riska yang telah menemani penulis selama hampir 8 tahun dalam suka maupun duka serta selalu memberikan semangat baru yang luar biasa dalam keseharian penulis. Sahabat Selow, Caca, Zatwa, Dea dan Petre yang setia menemani perjuangan penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2014, penulis bangga pernah belajar dan berjuang bersama kalian.
10. Mohammad Wirdan Syaifullah, S.H, yang telah penulis anggap sebagai kakak kandung penulis karena selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, ia selalu menjaga dan membantu penulis;
11. Teman terdekat penulis, Franky yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis saat penulis mengalami kesulitan dalam mencari buku literatur penulisan Tugas Akhir ini. Semoga selalu menjadi orang baik. You're the best and never give up.

Malang, 10 Januari 2018

## DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam.....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiasi .....	v
Ungakapan Pribadi/Motto .....	vi
Abstraksi .....	vii
Abstract .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Lampiran .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penulisan .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
a. Bagi Mahasiswa .....	11
b. Bagi Penegak Hukum.....	12
c. Bagi Penulis .....	12
d. Bagi Masyarakat.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penulisan .....	13
1. Metode Pendekatan .....	14
3. Teknik Pengumpulan Bahan .....	16
4. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	17
G. Rencana Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	19
A.1. Konsep Sistem Peradilan Pidana .....	19

A.2. Sub Sistem Peradilan Pidana .....	21
A.3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	24
B. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	25
B.1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	25
B.2. Pengaturan Kekuasaan Kehakiman.....	27
B.3. Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kekuasaan yang Merdeka.....	28
C. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	29
C.1. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi.....	29
C.2. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	30
C.3. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi .....	33
D. Upaya Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	34
E. Mahkamah Konstitusi .....	37
F. Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	38
F.1. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.....	38
F.2. Kedudukan SEMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	39
F.3. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	41
G. Kepastian Hukum .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Terhadap pasal 268 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali .....	46
B. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013 terhadap pasal 24 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .....	53
B.1. Deskripsi Alasan Pengajuan <i>Judicial Review</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 .....	53
B.2. Amar Putusan .....	55
B.3. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.....	56
B.4. Implikasi Terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	60

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73





## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Tugas Penulisan
- Lampiran 2 : Berita Acara Seminar
- Lampiran 3 : Kartu Kendali Bimbingan



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Ahmad Rifa'i, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Restu Agung.
- Jimly Asshiddiqie, 2010a. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2010b. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Leden Marpaung, 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta. UII Press.
- Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. Hal. 11.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke – 11. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainal Arifin Hoesein, 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press. Malang.

## JURNAL :

- Agung Barok Pratama. 2017. *Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*. Jurnal Pasca Sarjana UNS. Vol. 5 No.2
- Fajar Laksono Soeroso. 2014. *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol. 11. No. 1.
- Haposan Siallagan. 2016. *Penerapan Prinsip Hukum di Negara Indonesia*. Medan. Sosiohumaniora. Vol. 18 No. 2 Juli 2016. Fakultas Hukum HKBP Nommensen.
- Michael Barama. 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 8.
- Rachmani Puspitadewi. 2006. *Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.1.
- Rahayu Prasetyaningsih. 2011. *Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*. Bandung. Jurnal Konstitusi. Vol. 8 No. 5 Oktober 2011.
- Seno Wibowo Gumbira. 2016. *Problematisasi Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pasca Sema Ri No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 46 No.1. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Terbuka.
- Sofyan Jailani. 2012. *Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6. No. 3. September – Desember 2012.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)*. Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

## INTERNET :

- Admina Dwi Kusuma, *Pengertian Upaya Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesis.hukum.com>.

Ahmad Fauzi, *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara di Indonesia*, file:///C:/Users/User/Downloads/103-268-1-SM.pdf.

Ali Salmandhe, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.hukumonline.com>.

Ali Samiun, *Pembahasan Mengenai Aliran Positifisme dalam Filsafat Hukum*, <http://www.informasi ahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliran-positivisme.html>.

Amrizal J. Prang, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, [http://www.academia.edu/10264897/Implikasi\\_Hukum\\_Putusan\\_Mahkamah\\_Konstitusi](http://www.academia.edu/10264897/Implikasi_Hukum_Putusan_Mahkamah_Konstitusi).

Asep Nursobah, *Inilah Putusan yang diajukan PK di Tahun 2016*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1410-inilah-putusan-yang-diajukan-peninjauan-kembali-di-tahun-2016>.

Ciline Ria Aprilia, *Problematisasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali*, file:///C:/Users/User/Downloads/11596-15109-1-PB.pdf.

I Dewa Ayu Inten Sri Damayanti, *Implikasi Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 Mengenai Judicial Review Pasal 268 Ayat (3) Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, file:///C:/Users/User/Downloads/10704-1-19634-1-10-20141017.pdf,

Ihsan Fauzia, *Pengertian Upaya Hukum dalam Acara Perdata*, [http://www.academia.edu/18431091/PENGERTIAN\\_UPAYA\\_HUKUM\\_Acara\\_Perdata](http://www.academia.edu/18431091/PENGERTIAN_UPAYA_HUKUM_Acara_Perdata).

Frista Prilla Sambuari, *Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/3012/2557>.

Jimly Asshiddiqie, S.H., *Gagasan Negara Hukum di Indonesia*, <http://www.jimly.com>.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.jimly.com>.

Junelpri Saragih, *Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, <http://www.hukumpedia.com/junelsida uruk/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia>.

*MA Kukuhkan PK Hanya Sekali*. Hukum Online. <http://icjr.or.id/ma-kukuhkan-pk-hanya-sekali/>. Di pos kan pada tanggal 02 Januari 2015.

*MA : PK Hanya Satu Sekail, Putusan MK Tak Dapat Dikesampingkan*. Sumber Cetak. <http://icjr.or.id/ma-pk-pidana-hanya-satu-kali-putusan-mk-tak-dapat-dikesampingkan/>. Di pos pada tanggal 02 Jnauari 2015.

Muhammad Mahrus Ali.(et.al). *Konstitutional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/pelitian/pdf/Tindak%20Lanjut%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20MK.pdf>.

Muhammad Nursal NS, *Proses Peradilan Pidana*, <http://www.negara hukum .com/hukum/proses-peradilan-pidana.html>.

Muhammad Tanziel Aziezi, *Tentang SEMA RI Nomor 7 Tahun 2014 (Bagian 1)*, <https://www.selasar.com/jurnal/7051/Tentang-SEMA-RI-Nomor-7Tahun-2014-Bagian-1>.

Muhammad Yasin, *Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA)*, [http://www.hukumonline.com/klinik /detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-skm a\)](http://www.hukumonline.com/klinik /detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-skm a)),

Ravica Setia Anggraini et.al, *Kesesuaian Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Korupsi dan Pemerasan dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP*, file:///C:/Users/User/Downloads/391-742-1-SM.pdf.

Robert Pranata, *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Analisa Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 Oleh Mahkamah Konstitusi)*, [http://www.academia.edu/12029846 /PENEMUAN\\_HUKUM\\_OLEH\\_HAKIM\\_Analisis\\_Perkara\\_Nomor\\_34 \\_PUUXI\\_2013\\_Oleh\\_Mahkamah\\_Ko nstitusi](http://www.academia.edu/12029846 /PENEMUAN_HUKUM_OLEH_HAKIM_Analisis_Perkara_Nomor_34 _PUUXI_2013_Oleh_Mahkamah_Ko nstitusi).

Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5264>,

Sovia Hasanah, *Perbedaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dengan Peninjauan Kembali*, <http://m.hukum online.com/klinik /detai/lt5970264663d2d /perbedaan-kasasi-demi-kepentingan-hukum-dengan-peninjauan-kembali>.

Threesya Aldina, *Kekuasaan Kehakiman*, [http://www.academia.edu/12280496 /Kekuasaan\\_Kehakiman\\_di\\_Indonesia](http://www.academia.edu/12280496 /Kekuasaan_Kehakiman_di_Indonesia),

Willy Riawan Tjandra, *Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, file:///C:/Users/User/Downloads/16158-30706-1-PB.pdf.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & PUTUSAN :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

## **SKRIPSI :**

Helen M. Pasaribu. 2017. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Terhadap Upaya Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana*. Universitas Sumatera Utara.

Moh. Mizan. 2014. *Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali (PK) dalam Perspektif Fiqih Siyash*.

Padang Saputra, 2014. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*.